

## Penguatan Pembukuan Unit Pengelola Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh

Krissantina Eferyn<sup>1</sup>, Nonni YAP<sup>2</sup>, Nindi Vaulia Puspita<sup>3</sup>, Oktaviana Wahyu Prihardina<sup>4</sup>, Oktaviani Wahyu Prihardini<sup>5</sup>

krissantina\_eferyn@unik-kediri.ac.id<sup>1</sup>, Nonni\_YAP@unik-kediri.ac.id<sup>2</sup>, nindi.vaulia@unik-kediri.ac.id<sup>3</sup>, dinaoktaviana518@gmail.com<sup>4</sup>, dinioktaviani261099@gmail.com<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Kediri

---

### Article History:

Received: 12-05-2023

Revised: 23-05-2023

Accepted: 04-07-2023

### Keywords:

Accounting

Financial

Strengthen

Copyright © 2023 the Authors

This is an open access article under the CC BY-SA License.

**Abstract:** *Improvement and capacity building to Strengthen Bookkeeping so that UPK reporting as a form of accountability and transparency to the public can be maintained. The method used in this training is the lecture method and the use of modules. The target is the financial management unit from 13 villages in the Trenggalek sub-district, totaling 22 people. The implementation of the strengthening on December 10, 2022 took place at the office of the assistant coordinator of Trenggalek City. From the bookkeeping strengthening activities carried out there were 6 financial management units that were able to make financial reports independently in accordance with bookkeeping guidelines in the city without slums program. Of the 6 financial management units that can make computerized reports, only 2 financial management units. 7 financial management units need more assistance in preparing financial reports.*

---

### Pendahuluan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perkotaan adalah salah satu program pemerintah yang tujuannya untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Indonesia (Fidiana, 2018). PNPM Mandiri dilakukan dengan proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat terutama masyarakat miskin yang ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan lagi obyek tetapi sebagai subyek penanggulangan kemiskinan (Kristianiati, 2014). Dalam melaksanakan program tidak langsung turun ke masyarakat, akan tetapi ada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang melaksanakan program tersebut. Dalam menjalankan program LKM memiliki oleh tiga unit, yaitu Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelola Sosial (UPS).

Keberlangsungan dari UPK mengelola pinjaman bergulir adalah dengan menjaga baik

Kinerja Keuangan UPK. Menurut Bastian, I. 2014 kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Kinerja Keuangan UPK ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada buku Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir (Kementrian Pekerjaan Umum, 2014) meliputi pinjaman yang tertunggak (*Portfolio at Risk/ PAR*), peminjam yang menunggak (*Loans at Risk/LAR*), Pencapaian Laba (*Return on Investment /ROI*) dan Efisiensi biaya (*Cost Coverage/ CCr*). Keberadaan kegiatan Pinjaman Bergulir yang dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK) Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) pada Program KOTAKU di Kab. Trenggalek dimulai sejak adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) tahun 2009. Alokasi bantuan dalam penanggulangan kemiskinan dalam suatu program harus memiliki tujuan yang tajam terhadap sasarannya (Sumodiningrat, 2011). Kegiatan ini merupakan salah satu bidang kegiatan Ekonomi di antara dua bidang kegiatan lainnya (Lingkungan dan Sosial) atau yang sering disebut dengan kegiatan Tridaya Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2010).

Pinjaman Bergulir ini bertujuan memberikan pinjaman modal usaha atau bagi yang akan memulai usaha untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang belum bisa mengakses lembaga keuangan formal (bank, BPR, koperasi, dan lain-lain), diberikan tanpa jaminan, dan penerima pinjaman berupa kelompok yang selanjutnya disebut Kelompok Swadaya Masyarakat (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2010); (Alfitri, 2014). Kegiatan Pinjaman bergulir yang dikelola UPK-LKM ini paling tidak mempunyai dua arti strategis (Amaran, 2019). Pertama memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan bantuan pinjaman modal tanpa jaminan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Termasuk didalamnya pembinaan terhadap usaha yang dilakukan maupun menata kebersamaan dalam berkelompok. Kedua Kegiatan Pinjaman bergulir bersifat produktif (menghasilkan laba), di mana laba ini akan menjadi sumber pendapatan guna pendanaan operasional dan kegiatan LKM melalui pembagian Laba Akhir tahun yang diperoleh. Di mana kedepannya sumber pemasukan ini diharapkan mampu menjadi salah satu penopang keberlanjutan eksistensi lembaga menuju kemandirian LKM.

Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2022, unit pengelola keuangan dalam pembuatan laporan keuangan masih menggunakan pembukuan secara manual. Ketika transaksi keuangan itu sedikit masih bisa dilakukan akan tetapi ketika transaksi simpan pinjam tersebut banyak maka ini menjadi kendala dalam pembuatan laporan keuangan. Selain itu, tingkat kesalahan dalam pencatatan kemungkinan besar terjadi. Unit pengelola

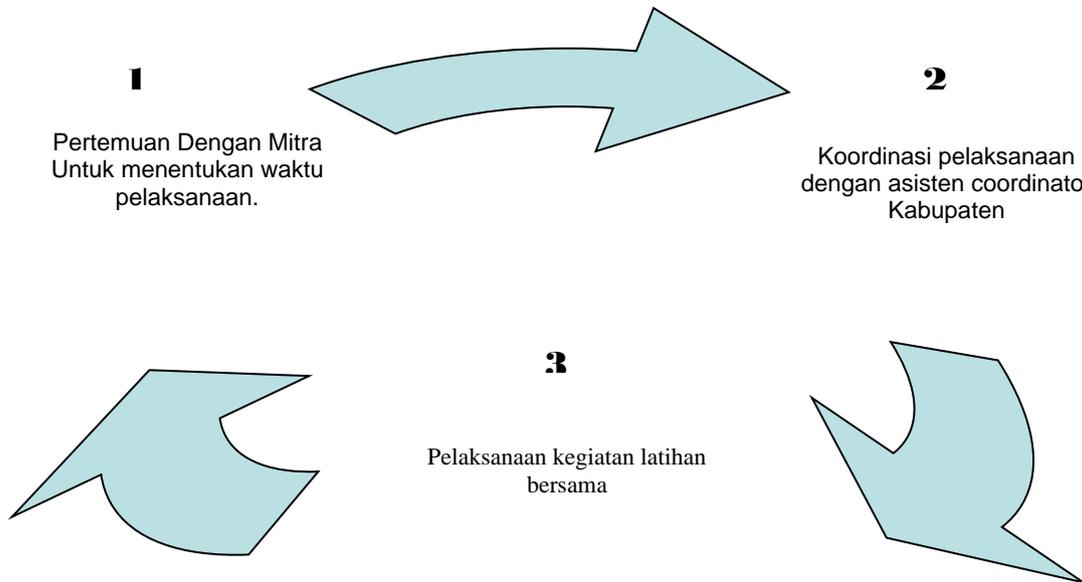
keuangan di dalam membuat laporan keuangan yang manual pun masih diperlukan pendampingan oleh pendamping dari program kota tanpa kumuh. Mengingat pentingnya keberadaan dan keberhasilan pengelolaan Pinjaman Bergulir oleh UPK, maka pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pengelola pinjaman bergulir UPK-LKM mutlak diperlukan (Wahyunifa, 2020). Pembinaan dan peningkatan kapasitas baik berupa Penguatan Pembukuan (dikarenakan adanya pergantian petugas UPK, penyesuaian dengan kegiatan dan permasalahan yang ada), sehingga pelaporan UPK sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat dapat terjaga. Penguatan kapasitas terhadap UPK-LKM dapat juga berkaitan dengan kemampuan dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok usaha masyarakat yang mendapatkan pinjaman, hal ini agar KSM sebagai penerima manfaat/pinjaman modal tidak hanya diminta untuk mengangsur semata tetapi juga ada pembinaan terhadap usaha yang dilakukan maupun membina kekompakan kelompok yang ada. Harapannya ada timbal balik antara UPK-LKM sebagai Pemberi Pinjaman Modal dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai Penerima/Pemanfaat bantuan pinjaman modal bergulir (Safuridah, 2017).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asry (2022) mengenai *Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pada Masa COVID-19* di mana hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan program dana pinjaman bergulir di kelurahan Tanjung Kecamatan Labuhan Haji tergolong sangat efektif dilihat dari kemudahan dalam memperoleh pinjaman, penyaluran dana pinjaman sudah sesuai dengan tujuannya. Sedangkan Unit pengelola keuangan yang ada di kecamatan Trenggalek yang berjumlah 13 unit pengelola keuangan berdasarkan informasi awal dari fasilitator keuangan mereka belum mampu membuat laporan keuangan secara mandiri mereka bergantung pada fasilitator dalam pembuatan laporan keuangan. Sehingga perlu diadakan penguatan terkait dengan pembuatan laporan keuangan sebagai bentuk dari pertanggung jawaban unit pengelola keuangan kepada masyarakat.

## Metode

1. Dalam pengabdian masyarakat ini metode yang digunakan dengan ceramah dan modul dari program nasional pemberdayaan masyarakat:
2. Peserta dalam pelatihan ini yaitu unit pengelola keuangan se kecamatan Trenggalek yang berjumlah 22 orang dari 13 desa yang ada di kecamatan Trenggalek.
3. Waktu pelaksanaan pelatihan tanggal 10 Desember 2022. Persamaan persepsi dengan masyarakat calon pengelola dan pihak terkait

4. Narasumber yang memberikan materi penguatan yaitu asisten koordinator program nasional pemberdayaan masyarakat Yaitu Bapak Arfan Yulizar, SE dan dibantu oleh fasilitator keuangan Trenggalek Bapak Sistriyono,SE. Adapun skema pelaksanaan ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

### **Pembahasan**

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan penguatan pembukuan bagi Unit Pengelola Keuangan ini di harapkan mereka mampu membuat laporan keuangan sendiri ketika program pemberdayaan Kota Tanpa Kumuh selesai. Nantinya mereka tetap mampu melaporkan keuangan yang dikelolanya kepada masyarakat dan pemerintah desa. Para Unit Pengelola Keuangan tetap bisa mengelola keuangan dana hibah yang sudah diberikan kepada masyarakat untuk terus dikembangkan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban para Unit Pengelola Keuangan kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan tersebut dengan membuat laporan keuangannya. UPK di sini diajari cara membuat bukti transaksi untuk dimasukkan kedalam buku kas atas transaksi yang terjadi setiap harinya. Dari buku kas nantinya akan dipisah mana yang termasuk pemasukan mana yang masuk ke dalam pengeluaran. Dari buku pemasukan dan pengeluaran itu akan memudahkan UPK untuk membuat neraca saldo. Dari buku pemasukan dan pengeluaran di input kedalam neraca saldo dan pendapat biaya. Dari buku neraca saldo dan pendapatan biaya nantinya akan diinput ke dalam neraca dan laba rugi.

Buku neraca saldo diinput untuk menjadi neraca sedangkan pendapatan biaya diinput untuk dijadikan laporan laba rugi. Laporan neraca dan laba rugi inilah yang akan dijadikan laporan kepada masyarakat. Dari kegiatan penguatan pembukuan yang dilakukan ada 6 unit pengelola keuangan yang mampu membuat laporan keuangan secara mandiri sesuai dengan pedoman pembukuan dalam program kota tanpa kumuh. Dari 6 unit pengelola keuangan yang bisa membuat laporan secara komputerisasi hanya 2 unit pengelola keuangan saja. 7 unit pengelola keuangan yang perlu pendampingan dalam membuat laporan keuangan.



Gambar 2. Metode Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

Dari hasil penguatan yang sudah dilakukan sudah terpetakan unit pengelola keuangan yang bisa membuat laporan keuangan secara mandiri tetapi masih manual belum terkomputerisasi antara lain unit pengelola keuangan Desa Karangsono, unit pengelola keuangan Desa Sambirejo, unit pengelola keuangan kelurahan Kelutan, unit pengelola keuangan Desa Sukosari. Unit pengelola keuangan yang bisa membuat laporan keuangan dengan menggunakan komputer yaitu unit pengelola keuangan kelurahan Tamanan, unit pengelola keuangan kelurahan Ngantru. Untuk unit pengelola keuangan kelurahan Sumbergedong, Surodakan, Rejowinangun, Parakan, Dawuhan, Ngares, Sumberdadi, Perlu dijelaskan dan latihan lebih lanjut terkait pengisian ke dalam laporan neraca saldo dan pendapatan biaya, meskipun belum bisa mengerjakan laporan keuangan secara utuh tetapi mereka sudah bisa mencatat transaksi ke dalam buku kas.

## Kesimpulan

Program pelatihan ini diharapkan akan menumbuhkan kepedulian terhadap pengelolaan keuangan dan pengembangan keuangan yang ada di Unit pengelola Keuangan. Rencana keberlanjutan program adalah terbentuknya Unit Pengelola Keuangan yang bisa secara mandiri melakukan pembukuan dalam mengelola keuangan apapun nantinya. Kedepannya diharapkan bisa lebih maju lagi dalam mengelola keuangan dengan

menggunakan IT yang memadai. Hal ini dapat cepat terwujud jika mendapat dukungan dari semua pihak, mulai dari masyarakat, aparat pemerintah, dan kalangan perguruan tinggi.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terima Kasih kepada Universitas Kadiri yang telah memberikan kesempatan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Terima kasih kepada unit pengelola keuangan yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan sehingga pelatihan bisa berjalan lancar. Terima kasih juga kepada asisten koordinator Kota tanpa kumuh kabupaten Trenggalek yang mengizinkan kami untuk melakukan pengabdian masyarakat di wilayah dampingan. Serta terima kasih kepada teman dosen dan mahasiswa yang telah membantu mesukseskan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

### **Daftar Pustaka**

- Asry, A. (2022). Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pada Masa Covid-19 (Studi Pada Rumah Tangga Peserta Program Kotaku Di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur). *EKONOBIS*. 7(2), 245-265
- Alfitri, R. (2014). Analisis Pengaruh Pinjaman Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perkotaan Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin (Studi Kasus Kec. Pakisaji Kab. Malang). *Jurnal Ilmiah*
- Amaran, E. (2019). Pengaruh Pemberian Pinjaman Bergulir Program Kota Tanpa Kumuh Terhadap Pendapatan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, Vol. 1, No. 2, p 1-11.
- Bastian, I. (2001). *Akuntansi Sektor Publik*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta: Penerbit BPFE
- Direktorat Jendral Cipta Karya – Kementrian Pekerjaan Umum. (2014). *Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir*
- Fidiana. (2018). Realisasi Akuntabilitas Badan Keswadayaan Masyarakat di Kota Batu. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 6(2), 151-161
- Kristianiati, A. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Pnpm-Mp) Di Desa Bligo Kabupaten Sidoarjo. *JKMP*, 2(2), 103-220
- Safuridah. (2017). Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu (Studi Kasus Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang). *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 1, No. 2, p 1-14.
- Sumodiningrat, Gunawan. (2011). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta : IDEA

(Institute of Development and Economic Analysis).

Wahyunifa. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1, No. 2, p 115-126